

Draft Uji Konsekuensi Tahun 2018

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Dokumen Proses Perencanaan (Desain) Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dan Kelengkapan Penunjangnya.	<ul style="list-style-type: none"> -UU No 11 Th 1974 Tentang Pengairan -UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) -Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 	<ul style="list-style-type: none"> -Terhambatnya proses analisis dan perencanaan (desain) Bidang SDA -Dapat mengganggu proses pengadaan tanah. 	<ul style="list-style-type: none"> -Menjaga akurasi dan obyektivitas proses perencanaan (desain) Bidang SDA -Menghindari timbulnya para spekulan tanah 	Terbatas sampai dengan selesainya Dokumen proses perencanaan (desain) Bidang SDA.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangan)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2	Dokumen Proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota Dan Kelengkapan Pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU. No. 14 tahun 2008 tentang KIP - UU. No. 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terhambatnya proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota - Terhambatnya Proses Pembahasan Raperda bersama Legislatif 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga obyektivitas proses Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota -Proses Pembahasan Raperda dapat berjalan lancar dan tepat waktu 	Terbatas sampai dengan disahkannya Review Perda RTRW Provinsi, Kab./Kota